



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADes), DANA DESA (DD),
ALOKASI DANA DESA (ADD), SERTA BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI (BHPR) TERHADAP BELANJA DESA
BIDANG PENDIDIKAN**

(Studi kasus di Desa Bringin, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen

Disusun Oleh:

Irfan Saputra

21801081393



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MANAJEMEN

2022

Abstract

This study entitled the effect of Village Original Income (PADes), Village Funds (DD), Village Fund Allocation (ADD), and Revenue Sharing Taxes and Retribution (BHPR) on Village Expenditures in the Education Sector (Case Study in Bringin Village, Wajak District, Malang Regency). The purpose of this study was to identify the influence of PADes, DD, ADD, and BHPR on village spending on education in Bringin village, Wajak sub-district, Malang district. The independent variables in this study were PADes, DD, ADD, and BHPR, while the dependent variable was village spending on education. The object of this research is the village income and expenditure budget report (APBDes) starting from the 2015-2021 period. The data for this research are from the Bringin village office, Wajak sub-district, Malang district.

The analysis technique used in this research is descriptive statistics, normality test, classical assumption test, and multiple linear regression test. In the interpretation of this research, it is shown that PADes, DD, and BHPR have a positive and significant influence on village spending on education. Meanwhile, ADD does not have a significant effect on village spending on education.

Keyword : *Village Original Income (PADes), Village Funds (DD), Village Fund Allocation (ADD), and Tax and Retribution Revenue Sharing (BHPR) on Village Expenditures in the Education Sector.*

Intisari

Penelitian ini berjudul pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan (Studi Kasus Pada Desa Bringin, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ada tidaknya pengaruh PADes, DD, ADD, Serta BHPR Terhadap belanja desa bidang pendidikan pada desa bringin, kecamatan wajak, kabupaten malang. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah PADes, DD, ADD, Serta BHPR, Sedangkan variabel terikatnya adalah belanja desa bidang pendidikan. Objek penelitian ini berupa laporan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) mulai dari periode tahun 2015-2021. Data penelitian ini dari kantor desa bringin, kecamatan wajak, kabupaten malang. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik, dan uji regresi linier berganda. Dalam hasil interpretasi penelitian ini adalah menunjukkan bahwa PADes, DD, dan BHPR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan. Sedangkan ADD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan.

Kata Kunci : *Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DAN), Alokasi Dana Desa (ADD), Serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai sekat-sekat dan berhak untuk mengatur dan mengatur jaringan urusan masyarakat sesuai dengan adat dan nenek moyang yang di diagnosa dan melalui pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 32). Pasal 1 Pemerintah Daerah 2004 Ayat 12). Dalam undang-undang desa yang lebih unik ditegaskan bahwa desa merupakan bagian terkecil dari bentuk pemerintahan di Indonesia. Desa berhak menetapkan pembangunan untuk dikembangkan dan memperindah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan perangkat desa merupakan sumber informasi kehidupan masyarakat yang paling dekat dan terbaik tentang tata kehidupan masyarakat (Syahrul Syamsi, 2014).

Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU RI 2014), Pasal 6 ayat 1, dalam Ayat 1 isi desa dapat dikatakan bahwa desa adalah satu kesatuan jaringan yang memiliki hambatan wilayah dan berhak untuk berubah dan melakukan urusan otoritas Inisiatif masyarakat, mobilitas dan hak tradisional menjadi kewenangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai lokasi *independent* terbawah dalam aparatur otoritas Indonesia, desa memiliki hambatan dalam pendanaan semua urusan kewenangan (Vergie, 2013).

Menurut Ordonansi yang baru diterbitkan pada 15 Januari 2014, UU No 6 Tahun 2014, Desa harus menerima uang desa (DD) nantinya

Desa Desa (DD) ditarik. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 10%, tidak diperoleh langsung dari desa melalui perantara. Namun sungguh kenyataannya, Dana Desa (DD) digalakkan sebagai bentuk pengawasan kabupaten/kota. Namun, besaran nominal dana desa (DD) bervariasi dari desa ke desa. Alokasi APBN sebesar 10% akan meningkatkan pendapatan desa. Perangkat pengendalian dana desa yang dikendalikan melalui sarana perangkat desa terdiri dari mekanisme pengambil alihan dan tugas, terkait Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kestabilan Ekonomi Antara Penguasa Besar dan Pemerintahan Berikutnya. Peraturan tersebut menetapkan bahwa pendanaan peningkatan kisaran harga yang diselesaikan melalui sarana pemerintah terdekat, bersama dengan otoritas tingkat desa, menganut prinsip bahwa kisaran harga mengikuti fungsi, terutama mematuhi fungsi otoritas. Ini adalah tugas dan kewajiban pemerintah dalam segala tingkatan. Dalam *gadget* otoritas kontemporer, desa memiliki posisi strategis dalam membantu pemerintah terdekat dalam pemerintahan (bersama dengan perbaikan). Semua itu merupakan langkah nyata bagi pemerintah terdekat untuk membantu pelaksanaan otonomi daerah terdekat. Selain DD, desa juga memperoleh hadiah dari Dana Desa (DD), khususnya bantuan keuangan dari pemerintah setempat dan lingkungannya kepada pemerintah desa untuk mengembangkan sumber daya utama bagi Pemberdayaan masyarakat lokal dan pedesaan ADD merupakan bagian baru dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang digunakan untuk membantu kisaran harga stimulus

perbaikan desa dalam jaringan dan pemberdayaan jaringan. 30% ADD dialokasikan untuk perangkat pedesaan, sedangkan 70% digunakan untuk aplikasi komunitas dan pemberdayaan komunitas. Hal ini jelas menunjukkan pentingnya desa dan kemampuannya membantu dalam pelaksanaan kekuasaan negara (Henareza, 2014). Desa kini tidak lagi paling baik memperoleh pendapatan dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak hanya berasal dari pendapatan asli desa (PADesa), terutama dari pendapatan desa, aset desa, swadaya, dan berpartisipasi jaringan. Desa juga akan menerima sisa penerimaan pajak dan bea cukai terdekat, termasuk pembagian tanah dan penerimaan pajak bangunan. Untuk membantu pelayanan dasar, khususnya sekolah desa, selain itu mereka berperan aktif melalui alokasi kisaran harga sekolah dalam APBD, khususnya untuk bantuan paket sekolah di tingkat kabupaten/kota. Sebagai contoh, aparat Desa Bringin, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, melakukan langkah nyata dalam disiplin persekolahan dengan menggunakan pemberlakuan cakupan persekolahan untuk sekolah dasar pada tahun 2007 yang mewajibkan mahasiswa untuk membayar biaya bulanan dan biaya perbaikan perguruan tinggi pada tahun 2008 menjadi berlipat ganda untuk sekolah mahasiswa. Cakupan ini bertujuan untuk meningkatkan intelektualitas masyarakat dan pemenuhan hak atas pendidikan di samping memberlakukan Pendidikan wajib sekolah Menengah (12 bulan) (Ratna Yuliana, 2015) tetapi, ada banyak batasan Untuk mencapai sekolah gratis di Desa Bringin khususnya sumber daya yang terbatas.

Melihat batas-batas tersebut, desa harus berperan aktif dalam pemenuhan paket sekolah pada taraf desa masing-masing melalui APBDesnya. Tetapi tentang hal tersebut, dari Permendag 21 Tahun 2015 dikonfirmasi pada tahun 2015 diajukan pada Dana (DD) 2016. Secara keseluruhan, kekhawatiran tentang penggunaan Dana Desa (DD) tercermin dalam dua daerah, khususnya pada lokal pemugaran pedesaan dan sekitarnya menjaga masyarakat pedesaan. Salah satunya menyebutkan peningkatan pembangunan pedesaan dalam bidang pelatihan. Di sini desa berperan dalam membantu pelatihan di Desa Bringin, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang.

Soal penegakan Undang-Undang Desa diatas, Saat ini tidak ada penelitian yang menunjukkan ataupun mengkaji dampak kepentingan desa terhadap belanja desa, jadi apakah belanja desa untuk pelatihan desa efektif dan meningkatkan keuntungan tidak diperhitungkan. Atau ikuti rekomendasi peraturan yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin membuat judul: **“Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Serta Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan (Studi Kasus Di Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tata cara perumusan pada tampilan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Desa (PADes) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan?
2. Apakah Dana Desa (DD) berdampak signifikan terhadap belanja pendidikan pedesaan?
3. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) Mempengaruhi Belanja Pendidikan Desa?
4. Apakah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) berdampak signifikan terhadap belanja pedesaan untuk pendidikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dampak variabel pendapatan asli pedesaan (PADes) terhadap belanja desa di bidang pendidikan.
2. Untuk mengidentifikasi dampak dana desa (DD) terhadap belanja pedesaan di bidang pendidikan.
3. Untuk mengetahui dampak Alokasi Dana Pedesaan (ADD) pada belanja pendidikan pedesaan.
4. Untuk mengetahui sistem Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR) mempengaruhi belanja desa di sektor pendidikan.

1.4 Manfaat Penelitian

Efek dari Penelitian ini akan sangat membantu untuk semua pihak yang berhubungan dengan studi ini adalah:

1. Untuk Pemerintah Desa

Kajian diharapkan menjadi bermanfaat bagi perangkat desa dalam menawarkan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD) Serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) dalam alokasi anggaran harga desa untuk pendidikan, Desa Bringin, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang.

2. Untuk Masyarakat

Konsekuensi dari pengamatan ini dapat bermanfaat untuk menawarkan fakta dan pengetahuan jaringan tentang peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) untuk biaya sekolah di Desa Bringin, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Studi ini merupakan hubungan tambahan referensi dengan peningkatan dan penambah pengetahuan ekonomi untuk peneliti selanjutnya khususnya dalam bidang ekonomi (manajemen).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel pendapatan asli desa (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan (Y) pada anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa Bringin, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang.
2. Variabel Dana Desa (X2) berpengaruh Positif dan signifikan terhadap belanja pendidikan Desa (Y) terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Bringin, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang.
3. Variabel Alokasi Dana Desa (X3) tidak dampak positif dan signifikan terhadap belanja pendidikan pedesaan (Y) terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) desa Bringin, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang.
4. Variabel Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan (Y) terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di desa Bringin, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang.

5.2 Keterbatasan Penelitian

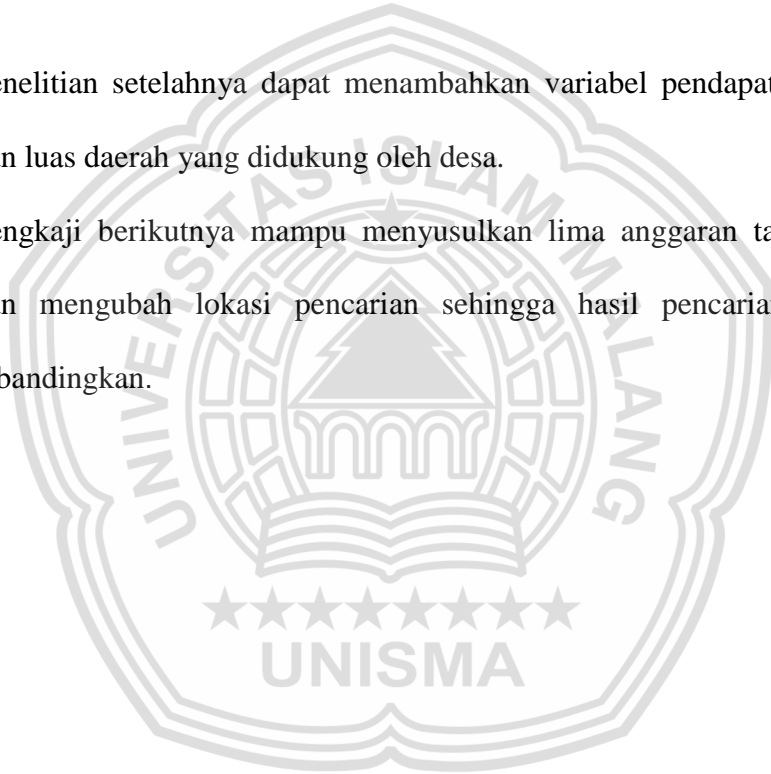
Berdasarkan penelitian, peneliti menemukan keterbatasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya mengambil data selama 7 periode yaitu 2015-2021. Jika peneliti selanjutnya mengumpulkan lebih banyak data APBDes dari peneliti ini, maka hasilnya akan sangat baik.
2. Penelitian ini hanya dapat dilakukan di satu lokasi penelitian yaitu Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

5.3 Saran

Adapun saran yang mungkin dibuat dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian setelahnya dapat menambahkan variabel pendapatan desa dan luas daerah yang didukung oleh desa.
2. Pengkaji berikutnya mampu menyusulkan lima anggaran tambahan dan mengubah lokasi pencarian sehingga hasil pencarian dapat dibandingkan.



DAFTAR PUSTAKA

¹Alfirdaus, Laila Kholid, Teguh Yuwono, D Ghulam Manar, Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik, Fakultas Ilmu, and others, 'Kemendagri (Ditjen Bina Pemerintahan', 01.04 (2020)

Amnan, AR, and H Sjahrudin, 'Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa', 2019
<<https://osf.io/preprints/inarxiv/frkez/download>> [accessed 11 October 2021]

Arifatun, Nur Amelia, and Rohmad Yuliantoro, 'Pajak Dan Retribusi (BHPR) Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2018 (Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Klaten)', *Skripsi: Universitas Ahmad Dahlan*, 2018.Dd (2019)

Dalukitowati, I, J Susyanti, MA Salim - Jurnal Ilmiah Riset, and undefined 2019, 'Pengaruh Belanja Modal Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Kinerja Keuangan Pada Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten', *Riset.Unisma.Ac.Id*
<<http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/4012>> [accessed 11 October 2021]

Dewi dan Irama (2018) Pengaruh PADes dan ADD terhadap belanja desa dan kemiskinan, (*Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma 2018 - jurnal.uisu.ac.id*)

¹ AR Amnan and H Sjahrudin, 'Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa', 2019 <<https://osf.io/preprints/inarxiv/frkez/download>> [accessed 11 October 2021].

Humanika, F Aryani - Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan, and undefined 2019,
'Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks
Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan Di Kabupaten Bima',
Ejournal.Undiksha.Ac.Id, 9.3
<<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/22539>> [accessed
11 October 2021]

Irawan, et al (2018) *Pengaruh PADes , DD, dan ADD terhadap Belanja Desa
(Studi kasus pada desa di Kabupaten Bandung, Journal of Entrepreneurship
Education Institut Teknologi Bandung*

Juniawan, MA, and NPS Suryantini, *Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap
Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali, Jurnal Ilmu Ekonomi,*
2018, 1
<<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/download/35981/23063>
> [accessed 11 October 2021]

Junaedy, S.E., M.Si (2015) *Pengaruh DAU, PAD, DBH, SiLPA, dan Luas
Wilayah Terhadap Belanja Modal diprovinsi papua, Universitas Yapis
Papua.*

Martini, Rita, Zulkifli Zulkifli, Sukmini Hartati, and Endah Widyastuti, 'Peran
Pendapatan Desa Untuk Belanja Desa Di Kabupaten Lahat', *Ekonomi &
Bisnis*, 19.2 (2021), 181–87 <<https://doi.org/10.32722/eb.v19i2.3442>>

Irawan, et al (2018) *Pengaruh PADes , DD, dan ADD terhadap Belanja Desa
(Studi kasus pada desa di Kabupaten Bandung, Journal of Entrepreneurship
Education Institut Teknologi Bandung*

Permatasari, I, T Mildawati - Jurnal Ilmu dan, and undefined 2016, 'Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur', *Jurnalmahasiswa.Stiesia.Ac.Id*
<<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/270/275>> [accessed 11 October 2021]

Pangestu (2017) *Analisis Pengaruh PADes, DD, ADD, dan BHPR terhadap belanja desa bidang infrastruktur (Studi empiris di desa se-Kabupaten Sukoharjo, academiccommons.columbia.edu*

Puspawati, et al (2018) Analisis PADes, DD, ADD dan BHPR terhadap belanja modal desa di Kabupaten Wonogiri, *International Journal of Social Sciences and Humanities. Universidad tecnica de manari*

Purbasari, et al (2018) *Analisis Pengaruh PADes, DD, ADD, dan BHPR terhadap belanja desa bidang pekerjaan umum dan pertanian (Studi empiris di seluruh desa se-Kabupaten sukoharjo, Program Studi Manajemen Bisnis Akademi Perdagangan Catur Insan Cendikia, Cirebon, Indonesia*

Rachim, ISA, ... RWD Paramita - Proceedings, and undefined 2019, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun Periode', ... *Stiewidyagalumajang.Ac.Id*
<<http://proceedings.stiewidyagalumajang.ac.id/index.php/progress/article/view/175>> [accessed 11 October 2021]

Skripsi, YS Hasan -, and undefined 2017, 'Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia', *Repository.Ung.Ac.Id*

<<https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/912413010/pengaruh-alokasi-dana-desa-terhadap-ketimpangan-distribusi-pendapatan-di-indonesia.html>>
[accessed 11 October 2021]

Sumiati, Waloo, and Anwar Made dan Rita Indah Mustikowati, 'Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015-2016)', *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 5.September (2017), 1–12

Sunardi, Nardi, and Rosa Lesmana, 'Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sejahtera', *Jurnal Sekuritas*, 3.1 (2020), 277–88

Susilowati, NI, D Susilowati, S Hadi - Jurnal Ilmu Ekonomi JIE, and undefined 2017, 'Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur', *Ejournal.Umm.Ac.Id*, 1 (2017), 514–26
<<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/6288>> [accessed 11 October 2021]

Sulistiyoningtyas (2017) *Pengaruh ADD dan PADes terhadap belanja desa di Kecamatan Baron Universitas Nusantara. Simki-Economic*, 2017